

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN RUMPIN

Jayanti Merdeka Wati¹, Rita Rahmawati², Faisal Tri Ramdani³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Djuanda

e-mail: jayanti.merdeka@gmail.com

ABSTRAK


Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk pemerintah desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa. Meskipun Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah menjadi salah satu strategi percepatan penurunan stunting, implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan pada tingkat pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penurunan stunting di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMT yang didanai Dana Desa telah berjalan, namun belum optimal. Permasalahan utama ditemukan pada penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat sasaran, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara efektif. Di sisi lain, komitmen pelaksana dan dukungan komunikasi antaraktor menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan program. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam fungsi koordinasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

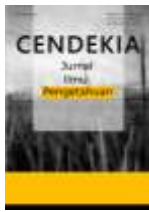
Kata Kunci: *implementasi kebijakan, Dana Desa, pemberian makanan tambahan, stunting*

ABSTRACT

Stunting remains a major public health issue that requires the involvement of multiple sectors, including village governments through the effective utilization of Village Funds. Although the Supplementary Feeding Program (PMT) has been promoted as one of the key strategies for accelerating stunting reduction, the implementation of policies prioritizing Village Fund allocation for this program continues to face various challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of the Village Fund prioritization policy in the Supplementary Feeding Program (PMT) as an effort to reduce stunting in Rumpin District, Bogor Regency. A qualitative approach with a descriptive case study design was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

 <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.10420>



model and validated through source and technique triangulation. The analysis was based on Edward III's policy implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Village Fund-based PMT policy has been carried out but has not yet achieved optimal results. Major challenges include uneven dissemination of information, limited human and financial resources, low community participation, and ineffective cross-sectoral coordination. On the other hand, implementers' commitment and effective communication among stakeholders serve as supporting factors. The study highlights that successful stunting reduction policy implementation is strongly influenced by the quality of communication, adequacy of resources, commitment of implementers, and coordination effectiveness among stakeholders. The findings imply the need to strengthen the coordinating role of sub-district governments, optimize Village Fund utilization, and enhance community participation to support sustainable stunting reduction efforts.

Keywords: *policy implementation, Village Funds, supplementary feeding program, stunting*

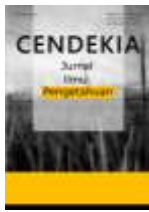
PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mendapatkan perhatian serius karena berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kapasitas belajar, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan yang bersifat kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif karena faktor penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan yang mendukung pelaksanaan program intervensi gizi (Wahyuzan & Saidah, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Berbagai intervensi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader masyarakat, serta keluarga sebagai sasaran utama program. Menurut Puspitasari et al. (2025), keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada sinergi antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

Salah satu strategi yang banyak digunakan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami masalah gizi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PMT memiliki kontribusi positif terhadap perbaikan status gizi anak apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian Pontang et al. (2024) menunjukkan adanya perbaikan status gizi balita setelah memperoleh PMT berbahan pangan lokal, sedangkan Risnawati (2025) menemukan bahwa program PMT berkontribusi terhadap peningkatan perkembangan gizi anak usia dini. Temuan serupa juga disampaikan oleh Tunny et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan lokal dalam PMT dapat menjadi inovasi yang efektif dalam mendukung tumbuh kembang balita stunting.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada desa melalui kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. Pemanfaatan Dana Desa untuk



program penurunan stunting dinilai strategis karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan sasaran secara lebih akurat. Handayani dan Arianto (2023) menjelaskan bahwa tata kelola Dana Desa yang baik dapat mendukung efektivitas program pencegahan stunting melalui peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta penguatan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Agustina (2026) menegaskan bahwa optimalisasi Dana Desa melalui program pemberian makanan tambahan mampu menjadi instrumen penting dalam mendukung upaya pencegahan stunting pada tingkat lokal.

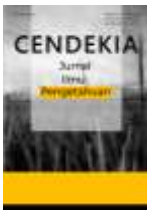
Meskipun demikian, implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Paji et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan stunting di tingkat desa sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat. Nur Sukmawati et al. (2026) juga menemukan bahwa implementasi program PMT belum selalu berjalan optimal karena terdapat perbedaan kapasitas pelaksana, ketersediaan anggaran, serta pemahaman terhadap tujuan program. Kondisi serupa dilaporkan oleh Nisa et al. (2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas PMT sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan dukungan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena keberhasilan intervensi gizi tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga pada keterlibatan keluarga dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan program yang tersedia. Aminah et al. (2021) menjelaskan bahwa partisipasi ibu balita dalam kegiatan posyandu memiliki hubungan erat dengan status gizi anak. Selain itu, peran kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat turut menentukan keberhasilan program pencegahan stunting melalui fungsi pendampingan, edukasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak (Siboro et al., 2025).

Kecamatan Rumpin merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Pemberian Makanan Tambahan. Namun berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan variasi antar desa. Sebagian desa menjadikan PMT sebagai program prioritas dalam agenda penurunan stunting, sementara desa lainnya melaksanakan program dengan intensitas dan alokasi yang berbeda sesuai hasil musyawarah desa dan kebutuhan lokal. Variasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu berlangsung secara seragam meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya. Grindle (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Kristian (2023) juga menegaskan bahwa tantangan implementasi kebijakan di Indonesia sering kali muncul akibat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, analisis implementasi menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut dipandang relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan



dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada evaluasi program PMT atau implementasi kebijakan pada tingkat desa, penelitian ini menempatkan Kecamatan Rumpin sebagai fokus analisis untuk memahami peran kecamatan dalam fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian administrasi publik sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penurunan stunting di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

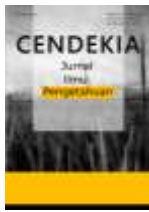
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penurunan stunting di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Fokus penelitian diarahkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai dimensi utama dalam implementasi kebijakan publik (Grindle, 2020; Kristian, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri atas camat, aparatur kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program PMT. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan stunting (Paji et al., 2025; Rinah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan, bentuk koordinasi antarpelaksana, pemanfaatan Dana Desa, serta berbagai kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan PMT dan keterlibatan para pelaksana program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa regulasi, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai implementasi program PMT dalam upaya percepatan penurunan stunting (Handayani & Arianto, 2023; Mosshananza & Pramazuly, 2024).

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antarkategori yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara lebih objektif dan mendalam (Nisa et al., 2025; Nur Sukmawati et al., 2026).



Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan fokus penelitian yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi Program PMT berbasis Dana Desa. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan serta memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rumpin (Raesalat et al., 2024; Purwanto & Putri, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penurunan stunting di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi berjenjang antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, dan kader posyandu. Penyampaian informasi dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi program, surat edaran, serta media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Mekanisme tersebut memungkinkan informasi mengenai pelaksanaan PMT dan penggunaan Dana Desa tersampaikan kepada pelaksana program di tingkat desa.

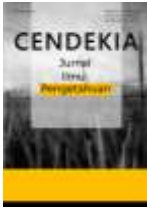
Meskipun demikian, ditemukan perbedaan tingkat pemahaman antar pelaksana terkait petunjuk teknis penggunaan Dana Desa untuk PMT. Beberapa informan menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai sasaran program, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk kegiatan yang dapat didanai. Di sisi lain, penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan pertemuan warga yang difasilitasi oleh kader kesehatan. Konsistensi informasi dijaga melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pihak kecamatan bersama instansi terkait.

Sumber Daya

Pelaksanaan Program PMT didukung oleh keterlibatan berbagai sumber daya, meliputi pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Desa. Dari aspek sumber daya manusia, seluruh desa telah memiliki kader dan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kader dan tenaga pendukung belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah sasaran yang harus dilayani. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja pelaksana relatif tinggi, terutama pada desa dengan jumlah balita sasaran yang besar. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program belum dilaksanakan secara merata.

Dari aspek sumber daya finansial, Dana Desa telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan PMT, tetapi besaran anggaran yang tersedia berbeda pada setiap desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Beberapa informan juga mengungkapkan adanya kendala administratif dalam proses pencairan anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan kegiatan. Dari sisi sarana dan teknologi, fasilitas pendukung program telah tersedia namun belum merata pada seluruh desa.



Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana program menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan PMT dan memiliki komitmen untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan kader posyandu secara umum memahami pentingnya program sebagai bagian dari intervensi gizi bagi balita dan ibu hamil.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan yang berasal dari masyarakat sasaran. Beberapa informan menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan kehadiran dalam kegiatan posyandu masih bervariasi. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, kader posyandu memperoleh insentif sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas. Namun, sebagian informan menilai bahwa insentif yang diberikan masih terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus dijalankan. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme penghargaan maupun sanksi bagi pelaksana program belum diterapkan secara formal.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PMT telah memiliki mekanisme kerja yang relatif jelas. Tahapan kegiatan meliputi perencanaan program melalui musyawarah desa, penetapan sasaran, penganggaran, pelaksanaan kegiatan PMT, hingga pelaporan dan evaluasi program. Setiap tahapan telah didukung oleh prosedur administratif yang menjadi pedoman bagi pelaksana di lapangan.

Koordinasi lintas sektor dilakukan melalui kerja sama antara kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan instansi terkait lainnya. Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam proses koordinasi, antara lain perbedaan data sasaran antarinstansi, keterlambatan penyampaian informasi, serta potensi tumpang tindih program yang memiliki tujuan serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Ringkasan Hasil Penelitian

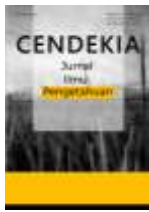
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kecamatan Rumpin telah terlaksana pada seluruh tahapan program. Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa kebijakan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perbedaan pemahaman pelaksana, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PMT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pembahasan

Pembahasan

Implementasi Kebijakan PMT Dana Desa dalam Upaya Penurunan Stunting di Kecamatan Rumpin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kecamatan Rumpin telah



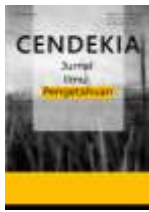
dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan dukungan pemerintah kecamatan, puskesmas, kader posyandu, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III.

Pada aspek komunikasi, proses penyampaian informasi mengenai kebijakan PMT telah dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, pendampingan, dan media komunikasi digital. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman antar pelaksana mengenai mekanisme penggunaan Dana Desa dan teknis pelaksanaan PMT. Temuan ini menunjukkan bahwa transmisi informasi belum sepenuhnya menghasilkan keseragaman interpretasi kebijakan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Kristian (2023) yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah perbedaan pemahaman antar pelaksana akibat proses komunikasi yang belum berlangsung secara efektif. Dalam perspektif Grindle (2020), keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga kemampuan aktor dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan operasional di lapangan.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Keterbatasan jumlah kader, tingginya beban kerja petugas kesehatan, serta belum meratanya pelatihan menyebabkan efektivitas program belum maksimal. Kondisi ini serupa dengan hasil penelitian Paji et al. (2025) dan Rinah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di daerah. Meskipun Dana Desa telah memberikan ruang pembiayaan yang cukup fleksibel, efektivitas penggunaannya tetap dipengaruhi oleh kapasitas pengelola program di tingkat desa. Handayani dan Arianto (2023) menegaskan bahwa tata kelola Dana Desa yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Dari aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, kader posyandu, dan tenaga kesehatan memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan program PMT. Komitmen tersebut terlihat dari konsistensi pelaksanaan kegiatan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, tantangan terbesar justru berasal dari rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan belum optimalnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aminah et al. (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi ibu balita dalam kegiatan posyandu memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi anak. Rendahnya keterlibatan keluarga berpotensi mengurangi efektivitas intervensi gizi yang diberikan pemerintah.

Pada aspek struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan PMT telah memiliki prosedur yang relatif jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Namun demikian, koordinasi lintas sektor masih menghadapi berbagai hambatan seperti perbedaan data sasaran, keterlambatan pelaporan, serta sinkronisasi program antarinstansi yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tersedia masih membutuhkan penguatan koordinasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nur Sukmawati et al. (2026) dan Nisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi program PMT sebagai upaya percepatan penurunan stunting.



Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PMT Dana Desa di Kecamatan Rumpin telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor implementatif yang saling berkaitan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan kebijakan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi di tingkat lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PMT Dana Desa

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PMT. Faktor pertama adalah komitmen pemerintah desa dan kecamatan dalam mendukung program penurunan stunting. Komitmen tersebut tercermin melalui pengalokasian Dana Desa, pelaksanaan monitoring, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan koordinasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mosshananza dan Pramazuly (2024) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah desa menjadi modal utama dalam mempercepat penurunan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat.

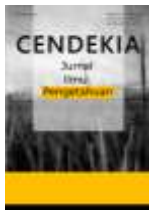
Faktor pendukung berikutnya adalah keberadaan kader posyandu dan tenaga kesehatan yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Kader tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana distribusi PMT, tetapi juga sebagai agen edukasi bagi keluarga sasaran. Hasil penelitian ini mendukung temuan Siboro et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kader posyandu memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pencegahan stunting melalui pendampingan, pemantauan pertumbuhan anak, dan penyuluhan gizi.

Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan PMT menjadi faktor pendukung yang cukup penting karena mampu menyesuaikan program dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ariestiningasih et al. (2024), Pontang et al. (2024), dan Tunny et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan lokal dalam program PMT dapat meningkatkan penerimaan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap status gizi balita stunting.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan. Faktor penghambat utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan program PMT. Sebagian keluarga sasaran belum memiliki kesadaran yang memadai mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Puspitasari et al. (2025) yang menegaskan bahwa keterlibatan keluarga dan masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan intervensi pencegahan stunting.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Jumlah kader yang terbatas, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan sarana dan dukungan anggaran menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian Paji et al. (2025) dan Rinah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya menjadi salah satu hambatan utama implementasi kebijakan stunting di tingkat daerah.

Selain itu, masih ditemukan kendala koordinasi lintas sektor yang ditandai dengan perbedaan data sasaran, sinkronisasi program yang belum optimal, serta variasi pelaksanaan PMT antar desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan integrasi yang lebih kuat antara pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan masyarakat agar tujuan program dapat dicapai secara maksimal. Temuan tersebut memperkuat pandangan Grindle (2020) bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antaraktor serta konteks kelembagaan tempat kebijakan dijalankan.



Upaya Peningkatan Implementasi Kebijakan PMT Dana Desa

Berdasarkan temuan penelitian, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PMT. Salah satu upaya utama adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Langkah ini menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan tambahan, tetapi juga pada perubahan perilaku keluarga sasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuzan dan Saidah (2025) yang menyatakan bahwa edukasi gizi dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan strategi penting dalam penanggulangan stunting.

Upaya berikutnya adalah penguatan kapasitas kader dan pelaksana program melalui pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas diperlukan agar kader mampu menjalankan fungsi edukasi, monitoring, dan pelaporan secara lebih efektif. Temuan ini mendukung penelitian Siboro et al. (2025) yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kader dalam mendukung keberhasilan program stunting.

Optimalisasi penggunaan Dana Desa juga menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pengadaan PMT, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan edukasi, penguatan kapasitas kader, serta pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Hal ini sesuai dengan temuan Handayani dan Arianto (2023) serta Agustina (2026) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang terarah dan inovatif dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting.

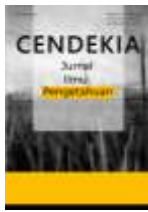
Selain itu, pemanfaatan pangan lokal perlu terus dikembangkan sebagai strategi keberlanjutan program. Penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ariestiningih et al. (2024), Pontang et al. (2024), dan Tunny et al. (2025) yang menunjukkan bahwa PMT berbasis pangan lokal mampu meningkatkan status gizi balita secara lebih berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan implementasi kebijakan. Kecamatan perlu memainkan peran yang lebih aktif sebagai koordinator antara pemerintah desa, puskesmas, kader, dan organisasi masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun perbedaan data sasaran. Upaya ini relevan dengan temuan Purwanto dan Putri (2024), Raesalat et al. (2024), serta Mosshananza dan Pramazuly (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan program PMT sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan.

Akhirnya, efektivitas program PMT perlu didukung oleh sistem evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur dampak program terhadap status gizi anak. Hasil penelitian Risnawati (2025) menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkala mampu memberikan informasi penting bagi perbaikan program dan peningkatan kualitas intervensi gizi. Dengan demikian, penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, optimalisasi Dana Desa, pemanfaatan pangan lokal, serta koordinasi lintas sektor menjadi strategi penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PMT dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Rumpin.

KESIMPULAN

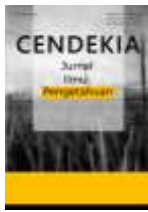
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PMT Dana Desa di Kecamatan Rumpin pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori Edward III, khususnya



terkait perbedaan pemahaman pelaksana, keterbatasan kapasitas, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan, di mana komunikasi yang cukup intensif, kolaborasi antar aktor, dan komitmen pemerintah desa menjadi faktor pendukung, sementara keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala sinkronisasi data menjadi faktor penghambat utama. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas kader, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tujuan penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. F. (2026). Strategi pengembangan program desa mandiri untuk cegah stunting melalui pemberian makanan tambahan balita di Desa Jambangan Kecamatan Candi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 633–647. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.350>
- Aminah, S., Rahmawati, R., & Santoso, A. (2021). Partisipasi ibu balita dalam kegiatan posyandu dan hubungannya dengan status gizi anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 55–63. <https://doi.org/10.15294/kemas.v16i1.24031>
- Ariestiningsih, E. S., Has, D. F. S., Kurniawan, B. A., Rahma, A. M., Riswanto, M. F. R., Savitri, S., & Visyawaludina, R. A. (2024). Pencegahan stunting sejak dini melalui optimalisasi modifikasi bahan pangan lokal di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 108–120. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v5i2.4302>
- Grindle, M. S. (2020). *Politics and policy implementation in the Third World* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Handayani, B., & Arianto, B. (2023). Strategi pencegahan stunting berbasis tata kelola dana desa. *Dialogika: Jurnal Manajemen dan Administrasi*, 3(2), 241–252. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.7544>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/155>
- Mosshananza, S., & Pramazuly, D. (2024). Strategi pemerintah desa dalam percepatan penurunan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Terapan*, 8(1), 45–62.
- Nisa, N., Husaini, M., & Munawarah, M. (2025). Implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 371–384. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/990>
- Nur Sukmawati, Pradina, L. A., Sari, Y., Perdana, A., & Sa'diah, R. (2026). Implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penurunan stunting. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2555–2565. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4682>
- Paji, D. N., Sinaga, M., & Larasati, G. W. K. (2025). Analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.55606/jrik.v5i1.4950>
- Pontang, G. S., Alia, A. P., & Setiyaningsih, S. (2024). Perbedaan status gizi sebelum dan



- sesudah pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal pada balita stunting di Desa Kalijambe dan Desa Tanjung Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 6(1), 53–67. <https://doi.org/10.55606/sinov.v6i1.801>
- Puspitasari, Y. D., Indarwati, R., Wahyuni, S. D., & Suraya, A. S. (2025). Community and family-based intervention strategies to prevent stunting: A systematic review. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 13(2), 286–298. <https://doi.org/10.33366/jc.v13i2.6613>
- Purwanto, Y. A. F., & Putri, R. M. (2024). Implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT) dan kegiatan posyandu sebagai upaya penurunan angka stunting di Desa Sumberbendo, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 847–856. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749064>
- Raesalat, R., Nurbudiwati, N., & Alawiyah, M. D. (2024). Strategi pemerintah desa dalam pencegahan stunting melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) TOSS di Desa Jangkurang Kecamatan Leles. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i1.148>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rinah, S. A., Utari, D. S., Mandala, E., Khairina, E., Karim, Z. A., & Nengsih, N. S. (2025). Evaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 254–267. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.324>
- Risnawati. (2025). Analisis evaluasi program pemberian makanan tambahan terhadap perkembangan gizi anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(5), 1637–1645. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7082>
- Siboro, S. M., Siboro, T., Hermawati, P., Jafar, I., & Wahyanto, T. (2025). Analisis peran dan tugas kader posyandu dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 45–54. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i1.5842>
- Tunny, R., Hatuwe, E., Umagapi, F., Dolang, M. W., & Tukiman, S. (2025). Pemberian makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal sebagai inovasi untuk meningkatkan tumbuh kembang balita stunting di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ners*, 9(4), 6311–6317. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i4.50685>
- Wahyuzan, D. A., & Saidah, S. D. (2025). Analisis literatur terhadap faktor risiko dan strategi penanggulangan stunting di Provinsi Aceh: Literature review. *Medic Nutricia: Journal Ilmu Kesehatan*, 16(1), 31–40. <https://cibangsa.com/index.php/medicnutriciajournal/article/view/1844>